

**PENGARUH KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP  
KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Diah Vitaloka**

Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta  
[diahvitaloka13@yahoo.co.id](mailto:diahvitaloka13@yahoo.co.id)

**Muchlis Hamdi**

Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta  
[muchlishamdi@ipdn.ac.id](mailto:muchlishamdi@ipdn.ac.id)

**Hyronimus Rowa**

Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta  
[hyronimus\\_rowa@ipdn.ac.id](mailto:hyronimus_rowa@ipdn.ac.id)

**Deti Mulyati**

Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta  
[deti.mulyati128@ipdn.ac.id](mailto:deti.mulyati128@ipdn.ac.id)

**Abstrak**

*Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah Kinerja DPRD Provinsi. Tujuan penelitian adalah membahas pengaruh Kapasitas Kelembagaan dan Komunikasi terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menyusun konsep baru dari pembahasan pengaruh tersebut. Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian 186 responden diambil dari populasi 351 menggunakan Tabel Krejcie. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, teknik kuesioner dan observasi. Analisis data menggunakan Analisis SEM. Hasil penelitian adalah berikut: Besarnya pengaruh Kapasitas kelembagaan terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,64, terbilang kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,58, terbilang cukup kuat dan signifikan. Konsep baru yang dapat disusun dari analisis hasil pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Konsep Baru tentang Susunan Kelembagaan Legislatif dengan definisi : Susunan Kelembagaan Legislatif adalah tata jabatan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang fraksi, komisi dan lembaga legislative dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi kelembagaan. Konsep baru yang dapat disusun dari analisis pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Konsep Baru tentang Komunikasi Lisan dan Tulisan Legislatif, dengan definisi : Komunikasi Lisan dan Tulisan adalah kemahiran individual dan kemahiran kolektif anggota legislative dalam mengelola informasi pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan yang dinyatakan dengan orasi, sosialisasi, argumentasi, publikasi.*

*Kata Kunci: Kapasitas Kelembagaan, Komunikasi, Kinerja.*

**Abstract**

*The phenomenon that is used as the object of research is the Performance of the Provincial DPRD. The aim of the research is to discuss the influence of Institutional Capacity and Communication on the Performance of the DPRD of the Bangka Belitung Islands Province and develop a new concept from discussing this influence. Research using quantitative research. The research sample of 186 respondents was taken from a population of 351 using the Krejcie Table. Data collection techniques using library research, questionnaires and observation techniques. Data analysis using SEM analysis. The results of the study are as follows: The magnitude of the influence of institutional capacity on the performance of the DPRD of the*

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Bangka Belitung Islands Province reaches 0.64, which is strong and significant. The magnitude of the influence of Communication on the Performance of the DPRD of the Bangka Belitung Islands Province reached 0.58, which is quite strong and significant. The new concept that can be compiled from the analysis of the results of the influence of Institutional Capacity on the Performance of the Bangka Belitung Islands Provincial DPRD is a New Concept of Legislative Institutional Structure with the definition: Legislative Institutional Structure is the layout and coordination of the implementation of duties and authorities of factions, commissions and legislative bodies in implementing the functions institutional function. A new concept that can be compiled from an analysis of the influence of Communication on the Performance of the Bangka Belitung Islands Provincial DPRD is a New Concept of Legislative Oral and Written Communication, with the definition: Oral and Written Communication is the individual skills and collective skills of legislators in managing information on the implementation of institutional functions that expressed by orations, outreach, arguments, publications.*

*Keywords: Institutional Capacity, Communication, Performance.*

## PENDAHULUAN

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, belum optimalnya kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan tampak menjadi suatu fenomena kinerja lembaga legislatif yang tidak berdiri sendiri.<sup>1,2</sup> Artinya, terdapat sejumlah variable yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut.

Menyermati fenomena tersebut penulis berasumsi bahwa kapasitas kelembagaan dan komunikasi merupakan dua variable yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Asumsi didasarkan pada *premise major* berikut:

*Pertama*, Kapasitas Kelembagaan berpengaruh terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena kapasitas kelembagaan tersebut merupakan kemampuan organisasional yang terbentuk dari pada perilaku individu, perilaku kelompok dan perilaku organisasi dalam melaksanakan fungsi kelembagaan. Karena itu, secara dinamis kemampuan organisasional tersebut mempengaruhi kinerja DPRD dalam menyelenggarakan fungsi kelembagaan. *Premise major* ini merujuk pada *premise minor* berikut:

*Capacity building* merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumberdaya manusia, penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zamzam, Fakhry, Chandra Satria, dan Jefirtson R. Riwu Kore. "Meningkatkan Motivasi Berafiliasi Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Se Sumatera Selatan." *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen* 3.2 (2018): 119-132.

<sup>2</sup> Astutik, Mardi. "Pengaruh Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang." *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)* 2.2 (2016): 141-159.

<sup>3</sup> Centia, Selvi Centia, Nandang Alamsah Deliarnoor, dan Rahman Mulyawan. "Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Periode 2014-2019." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6.3 (2020): 640-654.

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Kedua*, Komunikasi berpengaruh terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena aktivitas komunikasi yang meliputi *Intrapersonal communications; Interpersonal communication; Group communication; Organizational communication; dan Mass communication* yang mempengaruhi respon, sikap dan perilaku individu, perilaku kelompok dan perilaku organisasi dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan kegiatan lembaga. Karena itu, secara dinamis aktivitas komunikasi tersebut mempengaruhi kinerja DPRD dalam menyelenggarakan fungsi kelembagaan. *Premise major* ini merujuk pada *premise minor* berikut:

*Jay Galbraith believes communication is so important that he has define an organization as an information processing system. When organization can not process its information efficiently, communication becomes distorted or breakdown and members begin to misunderstanding one another. In extreme circumstances a breakdown in communication make it impossible for individuals to work with one another.*<sup>4</sup>

Dengan dukungan *premise major* dan *premise minor* yang demikian itu, dugaan penulis terhadap fenomena layak diaktualisasikan dengan mengadakan suatu pendekatan penelitian. Untuk itu, dipilih judul penelitian berikut: "Pengaruh Kapasitas Kelembagaan dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung"

Judul penelitian tersebut dipilih dengan alasan bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi kelembagaan termasuk dalam obyek forma Ilmu Pemerintahan, karena fungsi kelembagaan yang meliputi fungsi regulasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran adalah serangkaian pelaksanaan fungsi pemerintahan.<sup>5</sup> Fungsi-fungsi pemerintahan lainnya yang menjadi obyek forma Ilmu Pemerintahan adalah fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, fungsi penegakkan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi hubungan antar pemerintahan. Dengan demikian pemilihan judul penelitian layak dianggap telah mendarat pada obyek forma Ilmu Pemerintahan.

## **METODE PENELITIAN**

Operasionalisasi variabel penelitian meliputi 21 variabel manifes Kapasitas Kelembagaan yang dikonstruksi berdasarkan teori *The Capacity Framewor* McKinsey, 12 variabel manifes Komunikasi yang dikonstruksi berdasarkan teori komunikasi Ruben and Steward.<sup>6</sup> dan 12 variabel

---

<sup>4</sup> Gani, Najamuddin, dan Josner Simanjuntak. "Analisis Faktor Pengaruh Hubungan Kewenangan antar Lembaga Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 9.2 (2019): 141-170.

<sup>5</sup> Latif, Nurdin, dan Azhary Ismail. "Analisis Penempatan Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar." *Jurnal Ekonomi Prioritas* 1.1 (2021).

<sup>6</sup> W Lawrence, Neuman. "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches." (2014).

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

manifes Kinerja yang disusun berdasarkan teori kinerja Prawirosentono dijadikan 45 item kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 186 responden diambil dari populasi 351 menggunakan Tabel Krejcie.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, teknik kuesioner dan observasi. Analisis data menggunakan Analisis SEM.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil Uji Kecocokan Model : *Statistik Chi-Square* capai 62 dan *p-value chi square* 0,28 > 0,05 = Model fit dengan data. *Statistik RMSEA* mencapai 0,023 = Model fit dengan data. Uji *Normed Fit Index*: 0,99 > 0,95 = Model fit dengan data. Uji *Comparative Fit Index*: 1,000 > 0,95 dan uji *Incremental Fit Index*: 1,000 > 0,95 = model fit dengan data. Berdasarkan hasil 5 komponen uji kecocokan diperoleh kesimpulan bahwa *driven theory* yang digunakan untuk merancang model penelitian dapat dinyatakan cocok.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas: Keseluruhan item kuesioner dapat dinyatakan valid, karena *thitung* > *ttabel* 96. Keseluruhan variabel dapat dinyatakan reliabel (andal), karena nilai varian ekstrak: 0,66 > 0,50.

Hasil Pengujian Hipotesis: Besarnya pengaruh Ksi1 → Eta 0,64, terbilang kuat dan signifikan, karena *thitung* 13,51 > *ttabel* 1,96 dengan tingkat kepercayaan 95%. Besarnya pengaruh Ksi2 → Eta 0,58, terbilang cukup kuat dan signifikan, karena *thitung* 12,95 > *ttabel* 1,96 dengan tingkat kepercayaan 95%.

*Second CFA*: Dimensi *Organizational Structure* (0,91) dan Dimensi *Oral and Written Communication* (0,92) menjadi faktor-faktor yang paling dominan dalam proses pembentukan besarnya pengaruh Ksi → Eta. Hasil CFA ini dipandang sebagai suatu temuan penelitian dan dijadikan dasar penyusunan konspe baru.

### Pembahasan

Implikasi praktis adalah serangkaian kenyataan yang akan terjadi jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Implikasi Praktis terhadap hasil Analisis SEM disusun dengan konsep hubungan kausalitas berikut:

---

<sup>7</sup> Wijanto, Setyo Hari. "Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8." *Yogyakarta: Graha Ilmu* (2008).

<sup>8</sup> Setyo, Hari Wijanto. "Structural Equation Modelling dengan LISREL 8.8." *Jakarta Graha Ilmu* (2007).

### **Implikasi Praktis Pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Besarnya pengaruh Kapasitas kelembagaan terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,64. Besaran pengaruh ini terbilang kuat dan signifikan, karena Uji T  $13,51 > 1,96$ . Besarnya pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara teoritis ditentukan oleh *Aspirations, Strategy, Organizational Skills, Systems and Infrastructure, Human Resources, Organizational Structure, Culture*. Besarnya pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara praktis ditentukan oleh 21 variabel manifes Kapasitas Kelembagaan. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa di antara Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjalin suatu hubungan sebab-akibat yang bermakna : apabila Kapasitas Kelembagaan ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan Kapasitas Kelembagaan tersebut diikuti dengan peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh sebab itu, secara praktis, Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan, memperkuat atau mengoptimalkan 21 variabel manifes (indicator) Kapasitas Kelembagaan. Artinya, solusi terhadap belum optimalnya Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa dilakukan dengan cara meningkatkan 21 variabel manifes Kapasitas Kelembagaan DPRD. Dua puluh satu variabel manifes Kapasitas Kelembagaan yang dimaksud adalah berikut : Visi Lembaga, Misi Lembaga, Kebijakan Lembaga, Strategi Penganggaran, Strategi Pengawasan, Strategi Perwakilan, Perencanaan Agenda Sidang, Pengaturan Agenda Sidang, Pelaksanaan Agenda Sidang, Sistem Informasi, Sarana Kerja, Prasarana Kegiatan, Kuantitas SDM, Kualitas SDM, Kinerja SDM, Fraksi, Komisi, Lembaga, Etos Perilaku, Norma Perilaku, Etika Perilaku.

### **Implikasi Praktis Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Besarnya pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,58. Besaran pengaruh ini terbilang cukup kuat dan signifikan, karena Uji-T  $12,95 > T\text{-Value } 1,96$ . Besarnya pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja DPRD secara teoritis ditentukan oleh *personal skills and attitudes, interpersonal skills, dan oral and written communication*. Besarnya pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja DPRD secara praktis ditentukan oleh 12 variabel manifes (indicator) Komunikasi. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa di antara Komunikasi dan Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk suatu mekanisme hubungan sebab-akibat yang bermakna : apabila Komunikasi

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan Komunikasi tersebut diikuti dengan peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh sebab itu, secara praktis, Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan, memperkuat atau mengoptimalkan 12 variabel manifes Komunikasi. Artinya, solusi terhadap belum optimalnya Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilakukan dengan cara meningkatkan, memperkuat atau mengoptimalkan 12 variabel manifes Komunikasi. Dua belas variabel manifes Komunikasi yang dimaksud adalah Pandangan, Sikap, Perilaku, Tindakan, Komunikasi Formal, Komunikasi Informal, Koordinasi, Kolaborasi, Orasi, Sosialisasi, Argumentasi, dan Publikasi.

Implikasi Teoritis Pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Landasan Teoritik : McKinsey (2001) mengatakan “ *The Capacity Framework, defines nonprofit capacity in a pyramid of seven essential elements: three higher-level elements - aspirations, strategy, and organizational skills - three foundational elements - systems and infrastructure, human resources, and organizational structure - and a cultural element which serves to connect all the others.*<sup>9</sup> Dengan *driven theory* ini disusun definisi konseptual variabel berikut :

Kapasitas Kelembagaan adalah kondisi dan kemampuan organisasional DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi regulasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang ditelaah menurut *aspirations, strategy, organizational skills, systems and infrastructure, human resources, organizational structure, cultural*. Dari definisi konseptual diturunkan tujuh dimensi analisis yaitu (1) Dimensi *aspirations*, (2) Dimensi *strategy*, (3) Dimensi *organizational skills*, (4) Dimensi *systems and infrastructure*, (5) Dimensi *human resources*, (6) Dimensi *organizational structure*, dan (7) Dimensi *cultural*. Ketujuh dimensi tersebut dikembangkan menjadi 21 variabel manifes untuk dijadikan 21 item kuesioner penelitian.<sup>10</sup> Hasil penyebaran kuesioner tersebut diolah dengan Analisis SEM.

Landasan Statistik : Hasil Analisis SEM pada komponen *Second Confirmatory Factor Analysis* (CFA) menunjukkan bahwa Dimensi *Organization Structure* dengan bilangan hasil pengukuran yang mencapai 0,91 dengan *T-Value* 15,96 menjadi faktor yang paling dominan dalam proses pembentukan besarnya pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja DPRD

---

<sup>9</sup> Hero, Eko. "Health Communication; The Negotiation of Reproductive Rights in the Islamic Family in Riau Province." *Annual Conference of Communication, Media and Culture (ACCOMAC)*. Vol. 2. No. 1. 2020.

<sup>10</sup> Inzana, Nur, dan Siti Hidayatul Jumaah. "Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara." *Nusantara Hasana Journal* 1.12 (2022): 111-123.

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimensi tersebut mencakup tiga variabel manifes berikut :

(1). Fraksi; (2) Komisi; (3) Lembaga.

Konsep baru yang tersusun adalah Konsep Baru tentang Susunan Kelembagaan Legislatif dengan definisi: Susunan Kelembagaan Legislatif adalah tata jabatan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang fraksi, komisi dan lembaga legislative dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi kelembagaan.<sup>11</sup> Dengan definisi yang demikian itu tersusun 3 dimensi analisis: (1) Dimensi Fraksi; (2) Dimensi Komisi; dan (3) Dimensi Lembaga. Deskripsi konseptual tiga dimensi analisis tersebut adalah sebagai berikut :

Dengan dukungan penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli untuk memperlancar pelaksanaan tugas fraksi, maka setiap anggota partai politik yang bergabung dalam suatu Fraksi harus melaksanakan sebelas poin kewajiban anggota legislative. Di antara sebelas poin kewajiban anggota legislative tersebut, terdapat delapan poin kewajiban yang realisasinya harus dioptimalkan. Delapan poin kewajiban yang dimaksud adalah : *pertama*, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; *kedua*, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; *ketiga*, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; *keempat*, menaati tata tertib dan kode etik; *kelima*, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; *keenam*, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; *ketujuh*, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan *kedelapan*, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam konteks itu, tentu tidak mudah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena keterbatasan sumber daya anggaran yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena itu, Fraksi hanya bisa merekomendasikan, menyetujui dan atau memberi nilai tertentu kepada mitra kerjanya dalam merumuskan kebijakan alokasi anggaran serta menyusun program dan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan public. Meskipun demikian, pelaksanaan urusan pemerintahan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat harus tetap dioptimalkan. Urusan pemerintahan yang dimaksud antara lain kesehatan, pendidikan, perluasan lapangan kerja dan infrastruktur lingkungan. Walaupun tidak mudah menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, namun anggota Fraksi harus tetap menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

---

<sup>11</sup> Jusup, Sri Meike. "Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkota Gorontalo." *AkMen Jurnal Ilmiah* 17.3 (2020): 477-491.

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

masyarakat, terutama penganduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak tertentu.<sup>12</sup>

Dengan mengoptimalkan peran politik dan aksi-aksi politik, maka anggota-anggota legislatif dan orang-orang yang bekerja di lembaga legislatif tampak menjadi suatu himpunan kinerja sumber daya manusia yang sangat potensial untuk melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan yang efektif. Dengan mengoptimalkan peran politik dan aksi-aksi politik yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, maka kinerja Fraksi layak diharapkan menjadi optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan.

Dengan optimalisasi tersebut, keputusan-keputusan yang diambil dalam persidangan legislatif, hendaknya tidak hanya memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada pemerintah; namun memberi juga manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Manfaat yang dimaksud, sebagian tentu terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Manfaat yang demikian itulah yang diharapkan rakyat terhadap pelaksanaan fungsi perwakilan yang menjadi tugas para anggota legislatif. Pelaksanaan fungsi perwakilan tersebut merupakan penjawatahan suatu sistem manajemen perwakilan yang terbentuk dari dinamika hubungan hak dan kewajiban Negara kepada warga Negara dengan hak dan kewajiban warga Negara kepada Negara. Dinamika hubungan hak dan kewajiban inilah yang membentuk fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud terdiri atas fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi perwakilan, fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, fungsi penegakkan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan dan fungsi hubungan antar pemerintahan. Pelaksanaan fungsi perwakilan yang menjadi kewajiban fungsional lembaga legislatif adalah pelaksanaan fungsi pemerintahan yang melekat dan sekaligus menjadi identitas kelembagaan legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Fungsi pemerintahan yang dimaksud adalah fungsi perwakilan (representasi), fungsi pengaturan (regulasi) dan fungsi pengawasan.

Untuk itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran politik dan aksi-aksi politik anggota legislative hendaknya tidak hanya dipandang dari sisi keterbatasannya saja; akan tetapi dipandang juga dari sisi penting dan potensialnya peran politik dan aksi-aksi politik legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dengan mengoptimalkan peran dan aksi-aksi politik anggota legislatif dan memperkuat kinerja orang-orang yang bekerja di lembaga legislatif, maka diharapkan kinerja Fraksi menjadi lebih optimal. Dengan optimalisasi tersebut, kinerja anggota legislatif yang amanah dan mengabdikan kepada rakyat merupakan factor-

---

<sup>12</sup> Laila, Umar. "Efektivitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara)." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2022): 17-29.



Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan legislatif yang efektif. Dengan mengoptimalkan peran politik dan aksi-aksi politik Fraksi, diharapkan pelaksanaan fungsi representasi hendaknya dapat dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi yang lebih tepat dan cermat dalam menyikapi, mengatasi dan sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan rakyat. Karena hakikat perwakilan legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah menjaga kinerja pemerintahan agar tetap di jalurnya, maka sebaiknya anggota legislatif jangan pernah bersikap arogan terhadap siapapun. Jika pihak eksekutif diwajibkan memberi pelayanan yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pihak penerima layanan, maka alangkah baiknya kewajiban ini juga menjadi kewajiban bagi setiap anggota legislatif.<sup>13</sup>

Dengan dukungan sarana prasarana sekretariat yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, setiap anggota legislatif hendaknya berkenan bersikap proaktif dan mampu melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan para pihak yang berkepentingan dengan kinerja legislatif. Dengan dukungan sarana prasarana sekretariat yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, pelaksanaan fungsi regulasi yang dilakukan bersama pihak eksekutif, hendaknya dapat menghasilkan lebih banyak produk hukum. Dalam hal ini, meski didampingi tenaga-tenaga ahli, setiap anggota Fraksi sebaiknya pandai tampil secara optimal dalam membahas berbagai hal yang muncul dipersidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan nasib rakyat. Untuk itu, setiap anggota Fraksi, idealnya, mempunyai kompetensi yang relevan dengan bidang pengawasan legislatif dan juga mampu menyerap, mengolah dan menyalurkan informasi dari masyarakat.

Jika kinerja pelaksanaan fungsi representasi dinilai dari kuantitas dan efektivitas informasi yang diserap, diolah dan disalurkan; maka tidak demikian halnya dengan kinerja pelaksanaan fungsi regulasi. Kinerja ini dinilai dari seberapa banyak produk hukum yang dihasilkan oleh masing-masing komisi atau lembaga legislative bersama lembaga eksekutif selama satu tahun anggaran. Karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa rangkaian tata laksana dan hasil pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang optimal juga ditujukan untuk menghasilkan produk-produk hukum yang berkualitas guna meningkatkan efektivitas perwakilan legislative.<sup>14</sup> Dengan dukungan sarana prasarana sekretariat yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, pelaksanaan fungsi regulasi tetap membutuhkan dukungan sumber daya keanggotaan legislatif yang tidak hanya cerdas, ahli dan dapat diandalkan namun memiliki juga integritas dan komitmen yang optimal. Dukungan kinerja sumber daya keanggotaan

---

<sup>13</sup> Noviana, Nina. "Sistem Informasi Koordinasi Kelengkapan Dewan pada Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)* 4.1 (2020): 1-7.

<sup>14</sup> Nuraflah, Cut Alma, dan Delfi Iman Madani Siregar. "Peranan Komunikasi Politik dalam Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi E." *Network Media* 4.2 (2021): 51-65.

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

legislatif yang demikian itu juga dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Mengapa demikian, karena dalam pelaksanaan fungsi anggaran itulah mudah terjadi hal-hal yang dapat memotivasi terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif.

Dimensi Komisi: Komisi adalah salah satu Alat Kelengkapan lembaga legislatif yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. Dalam penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi tersebut dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. Artinya, meskipun barangkali tidak setiap anggota Komisi memiliki kompetensi yang relevan menurut ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi ia ditempatkan, namun dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli, aktualisasi peran politik dan aksi politik anggota legislative tentu masih bisa dioptimalkan.<sup>15</sup>

Dengan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; dengan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; dan dengan menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, maka aktualisasi peran politik dan aksi-aksi politik anggota legislative itu tentu akan mendapat simpati dan kepercayaan masyarakat. Peran politik dan aksi-aksi politik yang demikian itu merupakan rangkaian kinerja individu anggota dan kinerja lembaga legislative yang perlu dioptimalkan. Namun demikian bukan berarti anggota Komisi tidak membutuhkan kinerja orang-orang yang bekerja di lembaga legislative. Mengapa demikian, karena dengan kedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat dan sekaligus menjadi mitra kerja pemerintah, kinerja Komisi membutuhkan dukungan kinerja orang-orang yang bekerja di lembaga legislative, yaitu orang-orang atau ASN yang bekerja di Sekretariat Dewan. Karena itu, setiap anggota legislative tidak hanya dituntut untuk menunjukkan kinerja yang optimal kepada rakyat; namun dituntut pula untuk pandai mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan ASN dan para pihak yang berkepentingan dengan kinerja legislative. Hal ini sangat penting untuk mengaktualisasikan peran politik dan aksi politik lembaga legislative dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis.

Dengan mengoptimalkan peran politik dan aksi-aksi politik, maka anggota-anggota legislative dan orang-orang yang bekerja di lembaga legislative tampak menjadi suatu himpunan kinerja sumber daya manusia yang sangat potensial untuk melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan yang efektif. Dengan mengoptimalkan peran politik dan aksi-aksi politik yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang lengkap dan modern serta

---

<sup>15</sup> Poluakan, Christina Silvia, Daud M. Liando, dan Alfon Kimbal. "Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (Studi Kasus di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)." *Governance* 2.2 (2022).

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, maka kinerja Komisi layak diharapkan menjadi optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan.

Untuk itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran politik dan aksi-aksi politik anggota legislative hendaknya tidak hanya dipandang dari sisi keterbatasannya saja; akan tetapi dipandang juga dari sisi penting dan strategisnya peran politik dan aksi-aksi politik legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya demokratis namun mampu juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengoptimalkan peran politik dan aksi-aksi politik anggota legislative dan memperkuat kinerja orang-orang yang bekerja di lembaga legislative, maka diharapkan kinerja Komisi menjadi lebih optimal. Dengan optimalisasi tersebut, kinerja anggota legislative yang amanah dan mengabdikan kepada rakyat tampak menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan legislatif. Dengan mengoptimalkan peran politik dan aksi-aksi politik Komisi, diharapkan pelaksanaan fungsi representasi hendaknya dapat dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi yang lebih tepat dan cermat dalam menyikapi, mengatasi dan sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan rakyat.<sup>16</sup>

Karena hakikat keberadaan legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya mewakili kepentingan rakyat; namun menjaga kinerja pemerintahan agar tetap demokratis dan aspiratif, maka sebaiknya anggota legislative bersikap terbuka, komunikatif dan akomodatif terhadap rakyat. Dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli dan dukungan sarana prasarana sekretariat yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, setiap anggota Komisi hendaknya berkenan bersikap proaktif dan mampu melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan para pihak yang berkepentingan dengan kinerja legislatif. Dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli, pelaksanaan fungsi regulasi oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan bersama pihak eksekutif, hendaknya dapat menghasilkan lebih banyak produk hukum. Dalam hal ini, meski didampingi tenaga-tenaga ahli, setiap anggota Komisi hendaknya pandai tampil secara optimal dalam membahas berbagai hal yang muncul di rapat-rapat Komisi, terutama hal-hal yang berhubungan dengan nasib rakyat. Untuk itu, setiap anggota Komisi, diharapkan mampu melaksanakan fungsi pengawasan legislative secara efektif. Selain itu, setiap anggota Komisi juga diharapkan mampu menyerap, mengolah dan menyalurkan informasi dan pengaduan dari masyarakat secara efektif, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang secara politis tersisihkan, secara social perlu mendapat pendampingan, dan yang secara ekonomis membutuhkan pemberdayaan.

Dimensi Lembaga: Lembaga adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis bagi

---

<sup>16</sup> Polii, Josephien, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey. "Investigasi Pengetahuan dan Pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Penganggaran Berbasis Kinerja di Kota Bitung." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* 8.2 (2017).

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan terkait juga dengan kemampuan organisasional lembaga legislatif dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan. Kemampuan organisasional yang dimaksud meliputi kemampuan invidual anggota; kemampuan kolektif Fraksi, Komisi atau Panitia Kerja yang dibentuk secara khusus; dan kemampuan organisasi Dewan sebagai unsur pemerintahan daerah.<sup>17</sup>

Kemampuan invidual anggota legislative melekat pada kualitas sikap mental dan kapasitas intelektual. Kualitas sikap mental dan kapasitas intelektual ini sebagian terungkap dari etika perilaku politik anggota dalam melaksanakan aksi-aksi politik. Kemampuan kolektif Fraksi ini sebagian terindikasi dari dinamika komunikasi politik dan aksi-aksi politik. Kemampuan Komisi atau Panitia Kerja yang dibentuk secara khusus juga menunjukkan hal yang sama. Sedangkan kemampuan organisasi Dewan sebagai unsur pemerintahan daerah sebagian terindikasi dari kapasitas kelembagaan Dewan dalam melaksanakan etika dan norma pemerintahan. Sementara itu, kemampuan organisasional lembaga legislative, tidak hanya menunjukkan kualitas hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum di daerah; namun menunjukkan juga kualitas wakil-wakil rakyat dalam mengaktualisasikan peran politik dan aksi-aksi politiknya. Idealnya, setiap anggota lembaga legislatif itu mampu mengaktualiasikan peran politik dan aksi-aksi politiknya secara optimal, dengan etika perilaku politik yang layak diteladani. Etika perilaku politik yang dimaksud adalah etika perilaku kekuasaan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

### **Implikasi Teoritis Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Landasan Teoritik: Ruben and Steward mengatakan : *“Careers in business, government, or education call on our abilities to analyze communicationsituations, develop effectively communication strategies, collaborate effectivelywith others, and receive and present ideas effectively through variouscommunication channels. Studies of various occupations consistently identify the following communication competencies as among the most critical to success: Personal Skills and attitudes, Interpersonal skills, Oral and Written.”*<sup>18</sup> Berdasarkan teori komunikasi dari Ruben and Steward disusun definisi konseptual variabel berikut:

Landasan Statistik: Hasil Analisis SEM pada komponen *Second Confirmatory Factor Analisis* (CFA) menunjukkan bahwa Dimensi *Oral And Written Communication* dengan besaran hasil pengukuran yang mencapai 0,92 dan T-Value 16,68 menjadi faktor yang paling dominan

---

<sup>17</sup> Rosyaty, Tuty. "Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Konstituen Di Daerah Pemilihannya." *Jisia (Jurnal Ilmiah Sintesis Ilmu Administrasi)* 4.1 (2019).

<sup>18</sup> Kapucu, Naim, M. Augustin, dan M. Krause. "Capacity Building for Community-Based Small Nonprofit Minority Health Agencies in Central Florida." *management* 24.3 (2007).

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dalam proses pembentukan besarnya pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimensi tersebut mencakup 4 variabel manifes berikut : (1) Orasi; (2) Sosialisasi; (3) Argumentasi; dan (4) Publikasi.

Konsep baru yang tersusun adalah Konsep Baru tentang Komunikasi Lisan dan Tulisan Legislatif, dengan definisi : Komunikasi Lisan dan Tulisan adalah kemahiran individual dan kemahiran kolektif anggota legislative dalam mengelola informasi pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan yang dinyatakan dengan orasi, sosialisasi, argumentasi, publikasi. Dengan definisi yang demikian itu tercakup 4 dimensi analisis : (1) Dimensi Orasi; (2) Dimensi Sosialisasi; (3) Dimensi Argumentasi; dan (4) Dimensi Publikasi. Deskripsi konseptual empat dimensi analisis tersebut adalah berikut:

Dimensi Orasi: Tujuan orasi adalah untuk menyampaikan informasi dan atau suatu konsep gagasan yang tidak selaras dengan hal-hal tertentu. Orasi diucapkan di ruang terbuka. dan biasanya tanpa teks, judul, dan kebanyakan kalimat yang diucapkan dalam orasi adalah kalimat hiperbola yang berfungsi sebagai motivasi dan atau seruan mengajak atau mempengaruhi khalayak.<sup>19</sup>

Pada umumnya, seorang caleg berorasi dengan isu-isu tertentu bertujuan untuk menarik simpati dan sekaligus kepercayaan khalayak di ruang terbuka atau di tempat-tempat tertentu di mana khalayak sudah dipersiapkan untuk mendengarkan orasi. Orasi seperti ini merupakan salah satu modus kampanye politikus untuk mencapai ambisinya. Dengan berorasi seorang caleg tidak hanya menyampaikan isu-isu actual tertentu yang dianggap dapat mempengaruhi khalayak tetapi menyampaikan juga janji-janji tertentu kepada khalayak. Harapannya adalah mendapat simpati dan kepercayaan khalayak yang sebanyak-banyaknya, dan pada waktunya nanti memberi suara dukungan kepadanya dalam suatu pemilihan umum. Untuk itu, seorang caleg harus menguasai isu-isu actual yang disampaikan; berpenampilan menarik; berpidato dengan singkat, padat dan jelas; menggunakan intonasi dan ekspresi wajah yang meyakinkan; menggunakan gerak tubuh yang wajar; menghindari ketegangan; menggunakan bahasa yang komunikatif; dan tidak terpaku pada teks.

Bagi anggota legislative, berorasi tidak hanya diperlukan untuk selalu mengaktualkan komunikasinya dengan khalayak terutama dengan konstituennya; tetapi sekaligus juga diperlukan untuk menyampaikan gagasan dan upayanya sebagai anggota legislative. Dengan demikian maka seorang anggota akan selalu merasa hadir sebagai wakil rakyat. Orasi anggota legislative biasanya disampaikan pada momentum aksi-aksi social bersama. Misalnya, ketika

---

<sup>19</sup> Nurlia, Elly, dan Ali Nurdin. "Inkonsistensi dan Dampak Ketiadaan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Periode 2014-2019): Array." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7.2 (2021): 370-384.

terjadi bencana dan atau memperingati hari-hari besar tertentu. Aksi-aksi social bersama anggota legislative yang dimaksud pada umumnya dilakukan bersama celebrities dan kalangan pengusaha. Aksi social bersama tersebut biasanya mengikutsertakan wartawan atau media massa agar kemudian dapat dipublikasikan seluas-luasnya. Orasi yang dilakukan dengan aksi social bersama tersebut ada yang memang khusus ditampilkan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan social, pelayanan social dan atau pemberian bantuan social kepada kelompok warga masyarakat tertentu. Kegiatan pemberdayaan social pada umumnya dilaksanakan di lingkungan social tertentu yang menunjukkan suatu kondisi kemiskinan yang membutuhkan berbagai bantuan. Pada satu sisi, kegiatan seperti ini memang layak dipandang sebagai suatu usaha kesejahteraan social yang memberi manfaat tertentu kepada suatu kelompok warga masyarakat; namun di sisi lain, kegiatan ini seperti ini bisa juga menjadi pencitraan diri. Bagi anggota legislative, berorasi dalam aksi social bersama sah-sah saja; dan bahkan mungkin diperlukan untuk merawat simpati dan kepercayaan rakyat.

Dalam dimensi optimalisasi etika perilaku yang demikian itu, persoalannya adalah bahwa karena setiap pribadi mempunyai identitas, kapasitas dan integritas tersendiri, maka dengan sendirinya tidak semua anggota legislatif mampu menunjukkan nilai-nilai aktualisasi etika perilaku yang diharapkan. Karena itu, perilaku kekuasaan yang jujur, amanah dan mengabdikan serta santun kepada rakyat menjadi sangat penting dan bahkan menjadi factor penentu nilai-nilai pencapaian tugas dan wewenang anggota legislative. Idealnya, setiap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengaktualisasikan perilaku kekuasaan yang jujur, amanah dan mengabdikan serta santun kepada rakyat. Selain itu, mampu juga menunjukkan etika perilaku yang bertanggungjawab, berinisiatif, berorientasi ke masa depan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Aktualisasi yang dimaksud ini dapat disampaikan melalui orasi kepada khalayak.

Dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli, penyediaan sarana prasarana yang lengkap dan modern, dan terintegrasi dengan dukungan sistem informasi yang tak terbatas, idealnya setiap anggota legislatif mampu mengaktualisasikan peran politik dan perilaku politiknya secara optimal dengan menyampaikan orasi yang efektif kepada khalayak. Ukuran ideal peran politik dan perilaku politik yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup: *pertama*, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; *kedua*, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; *ketiga*, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dengan mengoptimalkan peran politik dan perilaku politik yang kolaboratif, maka perilaku anggota-anggota legislative tampak menjadi suatu himpunan

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

kinerja sumber daya manusia yang sangat potensial untuk melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan yang efektif.<sup>20</sup>

Dengan mengoptimalkan peran politik dan perilaku politik yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, maka kinerja individual Anggota, kinerja Fraksi, kinerja Komisi dan kinerja Lembaga layak diharapkan menjadi optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan. Untuk itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran politik dan perilaku politik anggota legislative hendaknya tidak hanya dipandang dari sisi keterbatasannya saja; akan tetapi dipandang juga dari sisi penting dan potensialnya peran politik dan perilaku politik legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dimensi Sosialisasi: Karena hakikat manusia itu adalah makhluk social, hidup dalam suatu lingkungan sosial dan terikat dengan norma kehidupan social, maka ia pun tidak luput dari suatu proses sosialisasi. Proses sosialisasi yang dimaksud terjadi dalam suatu rangkaian perilaku komunikasi dan interaksi sosial antar sesama individu atau antar kelompok. Rangkaian perilaku komunikasi dan interaksi sosial tersebut ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat informal. Tujuan sosialisasi antara lain untuk menyampaikan suatu informasi penting dan atau suatu konsep gagasan dari seorang atau sekelompok anggota legislative kepada anggota lainnya, atau kepada khalayak. Sosialisasi dilakukan dengan cara-cara tertentu, menggunakan media tertentu dilakukan oleh perseorangan atau kelompok.<sup>21</sup>

Dalam dimensi optimalisasi etika perilaku yang demikian itu, persoalannya adalah bahwa karena setiap pribadi mempunyai identitas, kapasitas dan integritas tersendiri, maka dengan sendirinya tidak semua anggota legislatif mampu menunjukkan nilai-nilai aktualisasi etika perilaku yang diharapkan. Karena itu, perilaku kekuasaan yang jujur, amanah dan mengabdikan serta santun kepada rakyat menjadi sangat penting dan bahkan menjadi factor penentu nilai-nilai pencapaian tugas dan wewenang anggota legislative. Idealnya, setiap anggota legislative dapat mengaktualisasikan perilaku kekuasaan yang jujur, amanah dan mengabdikan serta santun kepada rakyat. Selain itu, mampu juga menunjukkan etika perilaku yang bertanggungjawab, berinisiatif, berorientasi ke masa depan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli, penyediaan sarana prasarana yang lengkap dan modern, dan terintegrasi dengan dukungan sistem informasi yang tak terbatas, idealnya setiap anggota legislatif mampu mengaktualisasikan peran politik dan perilaku politiknya

---

<sup>20</sup> Sukma, Doddy. *Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau*. Diss. Universitas Islam Riau, 2019.

<sup>21</sup> Supriadi, Yadi. "Komunikasi Politik DPRD dalam Meningkatkan Peran Legislasi di Kota Bandung." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 10.1 (2017): 25-36.

secara optimal dengan melakukan sosialisasi yang efektif. Ukuran ideal peran politik dan perilaku politik yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup: *pertama*, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; *kedua*, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; *ketiga*, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dengan mengoptimalkan peran politik dan perilaku politik yang kolaboratif, maka perilaku anggota-anggota legislative tampak menjadi suatu himpunan kinerja sumber daya manusia yang sangat potensial untuk melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan yang efektif. Dengan mengoptimalkan peran politik dan perilaku politik yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, maka kinerja individual Anggota, kinerja Fraksi, kinerja Komisi dan kinerja Lembaga layak diharapkan menjadi optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.

Dengan meningkatkan aktualisasi etika perilaku dan komunikasi politik anggota legislative dalam bersosialisasi, diharapkan pelaksanaan fungsi representasi dapat dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi informal yang lebih tepat dan cermat dalam menyikapi, mengatasi dan sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan rakyat. Karena hakikat perwakilan legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah menjaga kinerja pemerintahan agar transparan, efektif, efisien dan akuntabel, maka sebaiknya setiap anggota legislative berupaya mengaktualisasikan etika perilaku yang ideal. Jika pihak eksekutif diwajibkan memberi pelayanan yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pihak penerima layanan, maka alangkah baiknya kewajiban ini juga menjadi kewajiban bagi setiap anggota legislative. Dengan narasi yang dikemukakan di atas, maka dengan sendirinya rangkaian aktualisasi etika perilaku dan orasi anggota legislative yang jujur, amanah dan melayani rakyat dapat dijadikan sebagai salah satu elemen kapasitas kelembagaan legislative yang mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan kegiatan lembaga legislatif.

Dimensi Argumentasi: Karena salah satu aktivitas anggota legislative yang diperlukan untuk mempengaruhi pengembalian keputusan atau perumusan kebijakan di dalam suatu persidangan atau rapat-rapat adalah memberi suatu pendapat atau gagasan terhadap proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tersebut, maka dengan sendirinya kemampuan berargumentasi menjadi salah satu kompetensi yang menentukan peran politik seorang atau sekelompok anggota legislative.

Karena itu, setiap anggota atau sekelompok anggota legislative sebaiknya pandai mengarang suatu argumentasi ketika harus memberi pandangan di dalam suatu persidangan atau rapat-rapat sebelum suatu keputusan atau kebijakan diputuskan. Karangan argumentasi yang dimaksud tentu harus memuat argumen, yaitu bukti dan alasan yang dapat meyakinkan orang lain



bahwa pandangan yang disampaikan itu benar. Karangan ini bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan memberikan juga data factual dan data fungsional yang memperkuat pendapat atau kesimpulan tersebut. Data factual yang dimaksud adalah data nyata mengenai gejala, peristiwa, kejadian, keadaan yang menjadi isu actual dalam persidangan atau rapat-rapat legislatif. Sedangkan yang dimaksud dengan data fungsional adalah peraturan perundang-undangan serta informasi penting yang terkait dengan isu actual tersebut.

Dengan dukungan data yang demikian itu, maka ciri-ciri paragraf argumentasi yang kuat adalah argumentasi yang disertai dengan alasan yang logis, data yang valid, dan analisa data yang kritis dan masuk akal. Fungsi dan tujuan argumentasi antara lain menyampaikan pendapat atau gagasan; mempengaruhi orang agar pendapat atau gagasan tersebut diterima atau dilakukan; mencari solusi terhadap isu-isu atau masalah yang perlu segera mendapat persetujuan serta penyelesaian dalam suatu persidangan atau rapat-rapat legislative internal datau eksternal.<sup>22</sup> Ciri-ciri argumentasi yang andal antara lain berisikan pendapat atau gagasan tentang suatu fenomena atau topik permasalahan tertentu; pendapat yang disertai alasan yang logis dan masuk akal; menunjukkan data faktual dan valid yang mendukung pendapat atau gagasan tersebut; fenomena dijabarkan dengan cara menganalisa dan memberikan analogi; dan bertujuan untuk bisa meyakinkan orang lain tentang pendapat atau gagasan yang disampaikan; dapat merumuskan suatu permasalahan secara kritis, logis, dan analistik; dan diakhiri dengan kesimpulan yang jelas dan meyakinkan.

Dengan unjukan arguimentasi yang demikian itu, sebaiknya argumentasi dilakukan tidak hanya untuk pencitraan diri sendiri saja, walaupun hal itu memang dimungkinkan. Bagi anggota legislative, yang tak boleh diabaikan adalah bahwa motif dan tujuan argumentasi tidak terlepas dari kepentingan tugas dan wewenang dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan, terutama fungsi representasi untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Karena itu, argumentasi sebaiknya dilakukan dengan persiapan yang optimal, dan lebih baik bila dilakukan secara professional. Artinya, peran politik dan aksi-aksi politik anggota legislatif yang terpolakan dalam suatu argumentasi hendaknya dilakukan dengan pendekatan yang tepat demi kepentingan rakyat. Dengan kenyataan bahwa setiap anggota legislative tidak luput dari peran sebagai wakil rakyat, maka sebaiknya peran tersebut diaktualisasikan dengan etika, norma dan perilaku sosial yang tepat dalam berargumentasi. Alangkah baiknya apabila argumentasi anggota legislative sepenuhnya dilakukan dengan menonjolkan peran sebagai wakil rakyat yang renda hati dan santun. Artinya, "atas nama rakyat" itu harus benar-benar dijadikan "*role model*" yang komunikatif dalam berargumentasi. Argumentasi yang menarik tentu tidak menonjolkan sikap

---

<sup>22</sup> Taufani, Muhammad. "Analisis Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan." *Kindai* 18.1 (2022): 135-149.

kekuasaan yang cenderung arogan. Argumentasi hendaknya dilakukan tanpa mengabaikan makna dan pemaknaan etika dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus diaktualisasikan oleh setiap wakil rakyat.

Mengacu pada hal-hal tersebut, maka peran politik dan aksi-aksi politik anggota legialstif yang dioptimalkan melalui penyampaian argementasi dalam setiap persidangan atau rapar-rapat hendaknya dapat dijadikan factor yang semakin meningkatkan etika kebaikan legislative. Agar peran politik dan aksi-aksi politik yang dimaksud tidak menyimpang serta mengabaikan kepentingan dan harapan rakyat, maka dengan sendirinya dibutuhkan suatu optimalisasi etika perilaku anggota legislative yang dibentuk dengan pandangan yang jujur, amanah dan mengabdikan kepada rakyat. Dalam dimensi optimalisasi etika perilaku yang demikian itu, persoalannya adalah bahwa karena setiap pribadi mempunyai identitas, kapasitas dan integritas tersendiri, maka dengan sendirinya tidak semua anggota legislatif mampu menunjukkan nilai-nilai aktualisasi etika perilaku yang diharapkan. Karena itu, perilaku kekuasaan yang jujur, amanah dan mengabdikan serta santun kepada rakyat serta ramah kepada para pihak menjadi sangat penting dan bahkan menjadi factor penentu nilai-nilai pencapaian tugas dan wewenang anggota legislative. Idealnya, setiap anggota legislative dapat mengaktualisasikan perilaku kekuasaan yang jujur, amanah dan mengabdikan serta santun kepada rakyat. Selain itu, mampu juga menunjukkan etika perilaku yang bertanggungjawab, berinisiatif, berorientasi ke masa depan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dimensi Publikasi: Publikasi adalah informasi yang dirancang untuk memperkenalkan, menjelaskan, meyakinkan hal-hal yang tercatat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenang anggota legislative dan atau kebijakan dan kegiatan lembaga legislative dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan; dan selanjutnya informasi tersebut disampaikan ke berbagai pihak atau khalayak tertentu melalui metode dan media komunikasi massa.

Mengacu pada hal-hal tersebut, maka peran politik dan aksi-aksi politik anggota legialstif yang dioptimalkan melalui kegiatan publikasi hendaknya dapat dijadikan factor yang meningkatkan etika kebaikan legislative. Agar peran politik dan aksi-aksi politik yang dimaksud tidak menyimpang serta mengabaikan kepentingan dan harapan rakyat, maka dengan sendirinya dibutuhkan suatu optimalisasi etika perilaku anggota legislative yang dibentuk dengan pandangan yang jujur, amanah dan mengabdikan kepada rakyat. Dalam dimensi optimalisasi etika perilaku yang demikian itu, persoalannya adalah bahwa karena setiap pribadi mempunyai identitas, kapasitas dan integritas tersendiri, maka dengan sendirinya tidak semua anggota legislatif mampu menunjukkan nilai-nilai aktualisasi etika perilaku yang diharapkan. Karena itu, perilaku kekuasaan yang jujur, amanah dan mengabdikan serta santun kepada rakyat menjadi sangat penting dan bahkan menjadi factor penentu nilai-nilai pencapaian tugas dan wewenang anggota

Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

legislative. Idealnya, setiap anggota legislative dapat mengaktualisasikan perilaku kekuasaan yang jujur, amanah dan mengabdikan serta santun kepada rakyat. Selain itu, mampu juga menunjukkan etika perilaku yang bertanggungjawab, berinisiatif, berorientasi ke masa depan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli, penyediaan sarana prasarana yang lengkap dan modern, dan terintegrasi dengan dukungan sistem informasi yang tak terbatas, idealnya setiap anggota legislatif mampu mengaktualisasikan peran politik dan perilaku politiknya secara optimal dengan melakukan publikasi yang efektif. Ukuran ideal peran politik dan perilaku politik yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup: *pertama*, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; *kedua*, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; *ketiga*, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dengan mengoptimalkan peran politik dan perilaku politik yang komunikatif, maka perilaku anggota-anggota legislative tampak menjadi suatu himpunan kinerja sumber daya manusia yang sangat potensial untuk melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan yang efektif. Dengan mengoptimalkan peran politik dan perilaku politik yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, maka kinerja individual Anggota, kinerja Fraksi, kinerja Komisi dan kinerja Lembaga layak diharapkan menjadi optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian adalah bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kapasitas Kelembagaan dan Komunikasi terhadap Kinerja DPRS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjalin suatu hubungan sebab-akibat yang bermakna apabila Kapasitas Kelembagaan ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan Kapasitas Kelembagaan tersebut diikuti dengan peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, Besarnya pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja DPRD secara teoritis ditentukan oleh *personal skills and attitudes*, *interpersonal skills*, dan *oral and written communication*

## **DAFTAR PUSTAKA**

Astutik, Mardi. "Pengaruh Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang." *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)* 2.2 (2016): 141-159.

- Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Centia, Selvi Centia, Nandang Alamsah Deliarnoor, dan Rahman Mulyawan. "Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Periode 2014-2019." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6.3 (2020): 640-654.
- Gani, Najamuddin, dan Josner Simanjuntak. "Analisis Faktor Pengaruh Hubungan Kewenangan antar Lembaga Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 9.2 (2019): 141-170.
- Hero, Eko. "Health Communication; The Negotiation of Reproductive Rights in the Islamic Family in Riau Province." *Annual Conference of Communication, Media and Culture (ACCOMAC)*. Vol. 2. No. 1. 2020.
- Inzana, Nur, dan Siti Hidayatul Jumaah. "Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara." *Nusantara Hasana Journal* 1.12 (2022): 111-123.
- Jusup, Sri Meike. "Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkota Gorontalo." *AkMen Jurnal Ilmiah* 17.3 (2020): 477-491.
- Kapucu, Naim, M. Augustin, dan M. Krause. "Capacity Building for Community-Based Small Nonprofit Minority Health Agencies in Central Florida." *management* 24.3 (2007).
- Laila, Umar. "Efektivitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara)." *Jurnal to Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2022): 17-29.
- Latif, Nurdin, dan Azhary Ismail. "Analisis Penempatan Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar." *Jurnal Ekonomi Prioritas* 1.1 (2021).
- Noviana, Nina. "Sistem Informasi Koordinasi Kelengkapan Dewan pada Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)* 4.1 (2020): 1-7.
- Nuraflah, Cut Alma, dan Delfi Iman Madani Siregar. "Peranan Komunikasi Politik dalam Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi E." *Network Media* 4.2 (2021): 51-65.
- Nurlia, Elly, dan Ali Nurdin. "Inkonsistensi dan Dampak Ketidadaan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Periode 2014-2019): Array." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7.2 (2021): 370-384.
- Polii, Josephien, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey. "Investigasi Pengetahuan dan Pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Penganggaran Berbasis Kinerja di Kota Bitung." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing" Goodwill"* 8.2 (2017).
- Poluakan, Christina Silvia, Daud M. Liando, dan Alfon Kimbal. "Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (Studi Kasus di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)." *Governance* 2.2 (2022).
- Rosyaty, Tuty. "Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Konstituen Di Daerah Pemilihannya." *Jisia (Jurnal Ilmiah Sintesis Ilmu Administrasi)* 4.1 (2019).
- Setyo, Hari Wijanto. "Structural Equation Modelling dengan LISREL 8.8." *Jakarta Graha Ilmu* (2007).

- Diah Vitaloka, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, Deti Mulyati: Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Sukma, Doddy. *Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau*. Diss. Universitas Islam Riau, 2019.
- Supriadi, Yadi. "Komunikasi Politik DPRD dalam Meningkatkan Peran Legislasi di Kota Bandung." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 10.1 (2017): 25-36.
- Taufani, Muhammad. "Analisis Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan." *Kindai* 18.1 (2022): 135-149.
- Toasa, Adriawan, dan Dedy Takdir Syaifuddin. "Peran Good Government Governance sebagai Mediasi Pengaruh Kapasitas Manajemen terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara." *Sigma: Journal of Economic and Business* 1.2 (2018): 44-51.
- W Lawrence, Neuman. "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches." (2014).
- Wijanto, Setyo Hari. "Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8." *Yogyakarta: Graha Ilmu* (2008).
- Zamzam, Fakhry, Chandra Satria, dan Jefirtson R. Riwu Kore. "Meningkatkan Motivasi Berafiliasi Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Se Sumatera Selatan." *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen* 3.2 (2018): 119-132.